

KPU Madina Serius Layani Hak Pilih Warga Lapas



Ketua KPU Madina, Agus Salam menerima berkas data warga binaan Lapas Panyabungan dari Kasi Bimnadik dan Giatja Lapas Kelas II B Panyabungan, Suyetno di ruang kerja Ketua KPU Madina, (foto tanggal 21/2/2018)

Panyabungan (kpud-madinakab.go.id), Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Mandailing Natal (Madina) pada hari Rabu (28/3) kembali menyerahkan data masyarakat Madina yang menjadi warga binaan Lembaga Pemasyarakatan (Lapas) dan Rumah Tahanan Negara (Rutan) yang ada di berbagai Kabupaten/Kota se-Sumatera Utara kepada Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil (Disdukcapil) Kab. Madina. Data yang diserahkan KPU Madina tersebut adalah tambahan dari data yang telah diserahkan pada bulan Februari yang lalu karena yang diserahkan pada waktu itu hanya data wargaan binaan yang ada di Lapas Panyabungan baik itu yang penduduk Madina maupun yang penduduk Kabupaten/Kota lain yang ada di Sumut tapi di tahan di Madina dan berpotensi memiliki hak pilih pada tanggal 27 Juni 2018 nanti. ?Hari ini yang kita serahkan ke Disdukcapil adalah data masyarakat Madina di berbagai Kabupaten/Kota yang menjadi warga binaan baik di Lapas maupun di Rutan?. Demikian disampaikan Anggota KPU Madina Divisi Perencanaan dan Data, Asrizal Lubis kepada kpud-madinakab.go.id

Berdasarkan surat Lampiran Surat Ketua KPU Propinsi Sumatera Utara Nomor 439/PL.03.1-SD/12/Prov/III/2018 tanggal 26 Maret 2018 tentang Data Lapas, Rutan, Panti Rehabilitasi dan Panti Sosial ada sebanyak 237 (dua ratus tigapuluh tujuh) masyarakat Madina yang menjadi warga binaan Rutan maupun Lapas, dengan rincian sebagai berikut dengan rician 4 (empat) orang di Humbahas, 187 (seratus delapan puluh tujuh) orang di Lapas Panyabungan, 1 (satu) orang di LP Narkotika Langkat, 1 (satu) orang di Paluta, 24 (dua puluh empat) orang di Padangsidimpuan, 18 (delapan belas) orang di Tanjung Gusta Medan dan 2 (dua) orang di Tapanuli Tengah.

?jadi hari ini, (28/3) nama yang 237 (dua ratus tiga puluh tujuh) orang tersebut kita serahkan ke Disdukcapil untuk diperiksa apakah terdaftar di data base kependudukan Madina. Kalau ada di data base kependudukan maka Disdukcapil kita minta supaya mengeluarkan Surat Keterangan (Suket) kependudukan yang bersangkutan, berdasarkan suket tersebutlah nanti KPU dapat melayani hak pilih warga binaan yang bersangkutan. Kalau ternyata namanya tidak ada dalam database kependudukan, ya, KPU tidak ada dasar untuk melayani hak pilihnya? Tutup Asrijal. Penyerahan nama-nama warga binaan Lapas tersebut adalah sebagai bagian dari bentuk keseriusan KPU dalam melayani hak pilih setiap warga negara.